Katalog: 9302020.15
ISSN 2301-4466

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI

MENURUT PENGELUARAN

2019–2023

VOLUME 9, 2024

https://jambi.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI

https://jambi.bps.go.id

Katalog: 9302020.15
ISSN 2301-4466

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI

MENURUT PENGELUARAN

2019–2023

VOLUME 9, 2024

https://jambi.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI MENURUT PENGELUARAN 2019–2023
Volume 9, 2024

Katalog: 9302020.15
ISSN: 2301-4466
Nomor Publikasi: 15000.24009

Ukuran Buku: 21x29,7 cm
Jumlah Halaman: x+80 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

https://jambi.bps.go.id

ISSN 2301-4466

TIM PENYUSUN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI MENURUT PENGELUARAN 2019–2023
Volume 9, 2024

Pengarah
Agus Sudibyo

Penanggung Jawab
Sumarmi

Penyunting
Nor Indah Fitriya Ningrum

Penulis Naskah
Lisa Gusmanita

Penata Letak
Oeliestina

Pembuat Kover
Rieko Nopriady

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (v*elocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry)*, pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/ permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini, diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Jambi, April 2024
Kepala BPS Provinsi Jambi

Agus Sudibyo, M.Stat.

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

ISSN 2301-4466

DAFTAR ISI
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAMBI MENURUT PENGELUARAN 2019–2023
Volume 9, 2024

Halaman

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB 5

BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA 7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga 9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT 12
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 17
2.5 Perubahan Inventori 22
2.6 Ekspor Impor 25

BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI 29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Jambi Menurut Pengeluaran 31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 36
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT 42
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah 43
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto 46
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori 47
3.7 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi 49
3.8 Perkembangan Impor Luar Negeri Provinsi Jambi 50
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antardaerah Provinsi Jambi 52

BAB 4 PERKEMBANGAN PDRB 53
4.1 Produk Domestik Regional Bruto (Nominal) 55
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor 56
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB 57
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB 58
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB 58
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor 59
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan 60
4.8 Neraca Perdagangan (*Balance of Trade*) 62
4.9 *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) 63

BAB 5 KESIMPULAN 65
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN-LAMPIRAN 71

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2019–2023 (Miliar Rupiah) 31
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2019–2023 (Miliar Rupiah) 32
Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2019–2023 (Persen) 34
Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2019–2023 (Persen) 35
Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Jambi, 2019–2023 (Persen)..... 36
Tabel 3.6 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2018–2022..... 37
Tabel 3.7 Struktur Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2019–2023 (Persen) 39
Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2019–2023 (Persen) 40
Tabel 3.9 Pertumbuhan Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2019–2023 (Persen) 41
Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Jambi, 2019–2023 42
Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2019–2023..... 43
Tabel 3.12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2019–2023 (Persen) 45
Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2019–2023 46
Tabel 3.14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2019–2023..... 48
Tabel 3.15 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi, 2019–2023 49
Tabel 3.16 Perkembangan Impor Luar Negeri Provinsi Jambi, 2019–2023..... 51
Tabel 3.17 Perkembangan Net Ekspor Antardaerah Provinsi Jambi, 2019–2023 52

https://jambi.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Jambi, 2019–2023.....55
Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2019–2023 56
Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jambi, 2019–2023.....57
Tabel 4.4 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jambi, 2019–2023.....58
Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2019–2023 59
Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jambi, 2019–2023 60
Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jambi, 2019–2023 61
Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Provinsi Jambi, 2019–2023..... .62
Tabel 4.9 *Incremental Capital Output Ratio* Provinsi Jambi, 2019–2023.... 64

https://jambi.bps.go.id

BAB 1
PENDAHULUAN

Apa itu PDRB?

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

https://jatim.bps.go.id

Penghitungan PDRB

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB,
yaitu:

A. Menurut Pendekatan Produksi
B. Menurut Pendekatan Pendapatan
C. Menurut Pendekatan Pengeluaran

https://jambi.bps.go.id

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

https://jambi.bps.go.id

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

1.1.1 Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Pengadaan Listrik dan Gas,
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
6. Konstruksi,

8. Transportasi dan Pergudangan,
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
10. Informasi dan Komunikasi,
11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
12. Real Estat,
13. Jasa Perusahaan,
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
15. Jasa Pendidikan,
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

https://jambi.bps.go.id

1.1.2 Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

1.1.3 Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya,
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun,
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah/daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah/daerah,
4. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/wilayah,
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi,
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri,
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk,
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Komponen Penyusun PDRB Menurut Pengeluaran

Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT

Pengeluaran Akhir Konsumsi Rumah Tangga

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pengeluaran Akhir Konsumsi Pemerintah

Ekspor dan Impor Barang dan Jasa

Perubahan Inventori

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

BAB 2 METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

2.1.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2 Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

https://jambi.bps.go.id

2.1.3 Cakupan

Komponen PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol,
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik,
3. Pakaian dan alas kaki,
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya,
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin,
6. Kesehatan,
7. Angkutan,
8. Komunikasi,
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan,
10. Pendidikan,

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel.
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok,
2. Pakaian dan Alas Kaki,
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga,
4. Kesehatan dan Pendidikan,
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya,
6. Hotel dan Restoran,
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*), nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer),
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri,
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain,
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang berkaitan dengan komponen PKRT, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut,
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga,

https://jambi.bps.go.id

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah,
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4 Penghitungan PKRT Tahunan

2.1.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

https://jambi.bps.go.id

2.1.4.2 Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas . Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai dari beberapa komoditas tertentu.

Hasil penghitungan tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

a. Estimasi PKRT hasil Susenas:

b. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun,

- Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.

b. Terhadap data poin kesatu dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu,

c. Data poin kedua dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,

d. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjus*t,

e. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP,

f. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

https://jambi.bps.go.id

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar.

2.2.2 Konsep dan Definisi

Sektor LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- Lembaga ini umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

Sektor LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. Jenis LNPRT dibedakan menjadi tujuh, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

https://ianbi.bps.go.id

2.2.3 Cakupan

Nilai PKLNPRT sama dengan nilai output non pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan lain-lain,
- Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya,
- Penyusutan,
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4 Penghitungan PKLNPRT Tahunan

2.2.4.1 Sumber data

a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non profit (SKLNP); informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

b. Hasil *updating* direktori LNPRT; informasi yang diperoleh dari hasil pemutakhiran direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga,

c. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.2.4.2 Metode Penghitungan

PKLNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PKLNPRT adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (nilai barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku) dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

X_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

X_{ij}: PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, = 1, 2, 3, …, 7

j : jenis pengeluaran LNPRT, = 1, 2, 3, …, 19

b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT atas dasar harga berlaku

Ni : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

PKLNPRT ADHK 2010 diperoleh dengan cara men-*deflate* PKLNPRT ADHB (yang diperoleh dari rumusan di atas) dengan IHK tahun dasar 2010.

https://jambi.bps.go.id

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non pasar.

Pada sistem perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

https://jambi.bps.go.id

2.3.2. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan, contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah,

b. Memproduksi jasa, contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditas (pendapatan jasa).

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) provinsi mencakup : a. pengeluaran konsumsi pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi; b. pengeluaran konsumsi pemerintah provinsi yang bersangkutan; c. pengeluaran konsumsi pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi; d. pengeluaran konsumsi pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

https://jambi.bps.go.id

2.3.4 Penghitungan PDRB Tahunan

2.3.4.1 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP provinsi tahunan adalah:

- Data realisasi APBN tahunan Kementerian Keuangan,
- Data realisasi APBD tahunan Kementerian Keuangan,
- Statistik Keuangan Daerah (BPS),
- Output Bank Indonesia (BI),
- Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta indeks harga dari BPS.

2.3.4.2 Metode Penghitungan

1. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah provinsi atas dasar harga berlaku, secara umum dihitung menggunakan rumusan berikut:

   PKP atas dasar harga berlaku =
   output non pasar - penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

   Output non pasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

   Untuk level provinsi, PKP provinsi atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut, pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut, dan pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan,

2. Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

https://jambi.bps.go.id

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Komponen PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

https://jambi.bps.go.id

2.4.3 Cakupan

Pembentukan Modal Tetap Bruto terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya, produk kekayaan intelektual, dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4 Penghitungan PMTB Tahunan

2.4.4.1 Sumber Data

Sumber data untuk penghitungan PMTB Tahunan yaitu:

1. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota,
2. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat,
3. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat,
4. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).
5. Laporan keuangan perusahaan,
6. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi,
7. Indeks Harga Perdagangan Besar dari Statistik Harga Perdagangan Besar,
8. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas),
9. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum,
10. Publikasi Statistik Konstruksi,
11. Data eksplorasi mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
12. Statistik Peternakan dari Ditjen Peternakan.

2.4.4.2 Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang

https://jambi.bps.go.id

menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "*supply*" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Metode Penghitungan PMTB dengan Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian dimana sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

https://jambi.bps.go.id

Metode Penghitungan PMTB dengan Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih

harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Yang pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

https://jambi.bps.go.id

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan SKK Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar,
- Nilai margin perdagangan dan angkutan (*trade and transport margin*) sulit diperoleh,
- Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu terlalu lama.

https://jambi.bps.go.id

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

2.5.1 Pendahuluan

Perekonomian juga memiliki aktivitas berupa inventori. Inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal.

Komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto di dalam PDRB, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir.

https://jambi.bps.go.id

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku dan penolong (material dan supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

- Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- Ternak untuk tujuan dipotong;
- Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan;
- Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Metode Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

2.5.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id),
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD,
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian,
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang,
- Data komoditas perkebunan,
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih,
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih,
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

https://jambi.bps.go.id

2.5.4.2 Metode Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

a. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun.
b. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya.
c. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflate perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan:

https://jambi.bps.go.id

- Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai,
- Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan yang dihadapi dalam menghitung komponen perubahan inventori:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

https://jambi.bps.go.id

2.6 EKSPOR IMPOR

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2 Konsep dan Definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/ pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3 Cakupan

Ekspor impor pada suatu wilayah terdiri dari:

d. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut.

e. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut.

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

2.6.4 Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

2.6.4.1 Sumber Data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US$);
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US$);
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2.6.4.2 Metode Penghitungan

Ekspor impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (FOB) dalam US$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

BAB 3

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI

2019
PDRB ADHB
216.927,71
PDRB ADHK
149.111,09

2020
PDRB ADHB
205.081,99
PDRB ADHK
148.354,25

2021
PDRB ADHB
232.294,15
PDRB ADHK
153.850,63

2022*
PDRB ADHB
276.719,44
PDRB ADHK
161.730,02

2023**
PDRB ADHB
293.729,31
PDRB ADHK
169.268,77

PDRB ADHK dan ADHB dalam Miliar Rupiah

*Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

https://jambi.bps.go.id

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

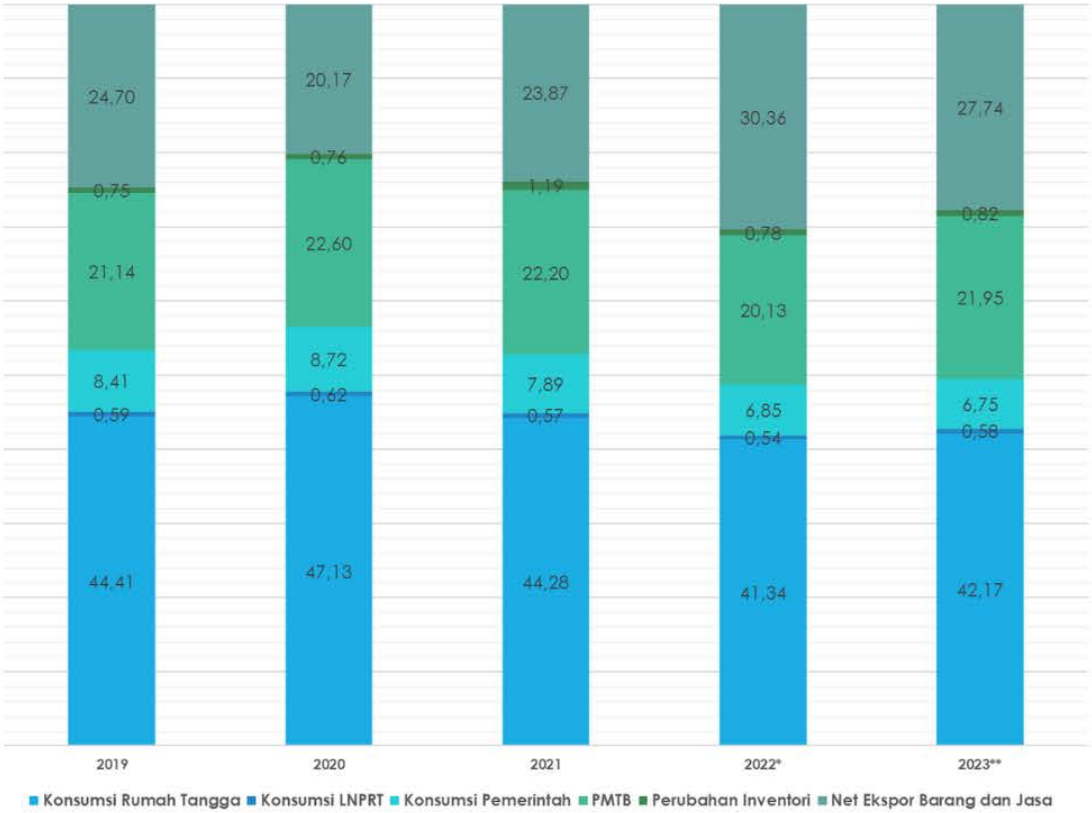

https://jambi.bps.go.id

BAB 3 TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Jambi akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 sampai dengan 2023, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi, pandemi Covid-19 (tahun 2020–2021), struktur perdagangan global, dan kondisi politik (persiapan penyelenggaraan pemilu 2024).

Secara internal maka dapat diamati bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Provinsi Jambi digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan secara deskriptif pada Bab 3 dan Bab 4.

https://jambi.bps.go.id

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB JAMBI MENURUT PENGELUARAN

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	96.343,53	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68
2. Konsumsi LNPRT	1.270,94	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72
3. Konsumsi Pemerintah	18.246,78	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99
4. PMTB	45.855,12	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.463,11
5. Perubahan Inventori	1.627,91	1.553,19	2.759,71	2.152,94	2.420,23
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	53.583,42	41.369,58	55.453,46	84.018,47	81.478,58
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	40.730,57	26.637,81	38.844,96	45.098,99	35.432,95
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1.535,19	1.366,32	640,87	911,17	1.618,96
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	14.388,04	16.098,10	17.249,38	39.830,65	47.664,59
Total PDRB	216.927,71	205.081,99	232.294,15	276.719,44	293.729,31

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (2010=100) yang cenderung meningkat.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian nasional dan berimbas pada perekonomian Provinsi Jambi. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 216,93 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 205,08 triliun rupiah pada tahun 2020.

Perekonomian Provinsi Jambi kembali pulih sejak pertengahan 2021, ditandai dengan kenaikan nilai ekspor barang dan jasa luar negeri dari 26,64 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 38,84 triliun rupiah pada tahun 2021. Pascapandemi Covid-19, kondisi ekspor Provinsi Jambi semakin membaik hingga mencapai 45,10 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, ekspor barang dan jasa luar negeri kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 35,43 triliun rupiah akan tetapi kondisi ini juga diimbangi dengan kenaikan net ekspor barang dan jasa antardaerah sebesar 47,66 triliun rupiah.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65.279,81	64.991,05	67.206,01	70.205,87	73.149,41
2. Konsumsi LNPRT	845,22	838,90	855,19	906,94	1.000,47
3. Konsumsi Pemerintah	11.556,81	10.950,82	10.956,42	11.121,82	11.341,35
4. PMTB	31.894,30	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37
5. Perubahan Inventori	1.177,08	814,98	1.720,56	1.286,55	1.271,85
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	38.357,87	38.531,52	37.896,93	42.108,79	42.838,32
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	39.266,74	28.168,66	34.748,49	32.522,37	26.853,10
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1.015,61	959,51	440,15	527,17	908,44
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	106,74	11.322,37	3.588,59	10.113,59	16.893,66
Total PDRB	149.111,09	148.354,25	153.850,63	161.730,02	169.268,77

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Jambi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dari 149,11 triliun pada tahun 2019 menjadi 148,35 triliun rupiah pada tahun 2020. Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan di masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Pada tahun 2021, PDRB atas dasar harga konstan kembali meningkat mencapai 153,85 triliun rupiah dan terus meningkat berada di atas 160 triliun dengan nilai masing-masing 161,73 triliun rupiah pada tahun 2022 dan 169,27 triliun rupiah di tahun 2023.

Selama kurun waktu 2019–2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jambi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 3.2 diatas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2019. PDRB kemudian menurun pada tahun 2020 dan mulai mengalami pemulihan pada tahun 2021-2023.

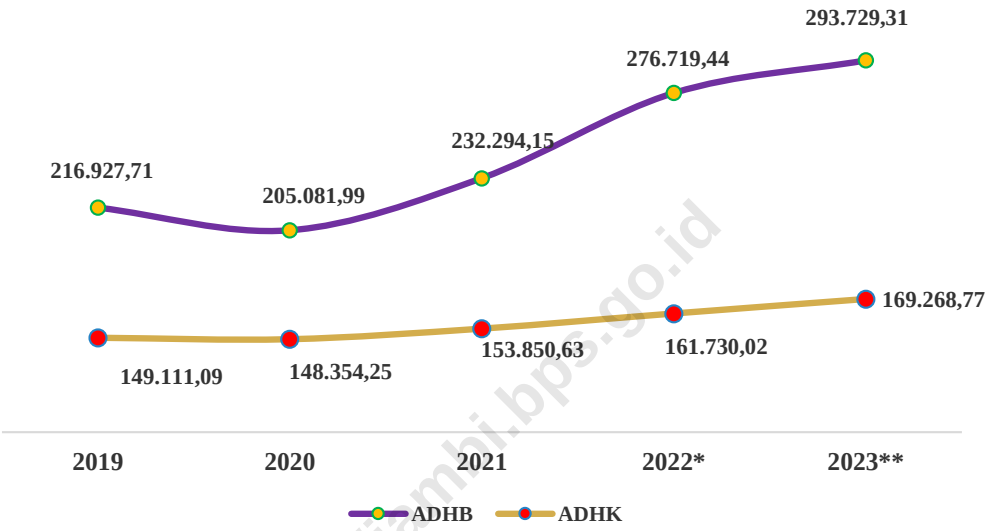

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (miliar rupiah), 2019–2023

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh perubahan harga sedangkan PDRB atas dasar harga konstan telah meniadakan pengaruh faktor harga. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2021–2023, PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi perekonomian secara umum.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	44,41	47,13	44,28	41,34	42,17
2. Konsumsi LNPRT	0,59	0,62	0,57	0,54	0,58
3. Konsumsi Pemerintah	8,41	8,72	7,89	6,85	6,75
4. PMTB	21,14	22,60	22,20	20,13	21,95
5. Perubahan Inventori	0,75	0,76	1,19	0,78	0,82
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	24,70	20,17	23,87	30,36	27,74
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	18,78	12,99	16,72	16,30	12,06
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	0,71	0,67	0,28	0,33	0,55
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	6,63	7,85	7,43	14,39	16,23
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Komponen penyusun PDRB pengeluaran terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, ekspor, dan impor. Dalam publikasi ini, komponen ekspor dan impor disajikan menjadi ekspor barang dan jasa luar negeri, impor barang dan jasa luar negeri, dan net ekspor antardaerah.

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2019–2023, aktivitas permintaan akhir yang memberikan andil terbesar terhadap PDRB pengeluaran adalah komponen konsumsi akhir rumah tangga (di atas 40 persen). Besarnya andil komponen ini cukup membantu perekonomian Provinsi Jambi untuk bertahan pada era pandemi Covid-19, walaupun terkontraksi pada tahun 2020. Kontribusi komponen konsumsi akhir rumah tangga sempat turun dari 44,28 persen pada tahun 2021 menjadi 41,34 persen pada tahun 2022. Kontribusinya kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 42,17 persen.

Komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah net ekspor barang dan jasa yaitu sebesar 27,74 persen (komponen net ekspor barang dan jasa antardaerah berkontribusi sebesar 16,23 persen; komponen ekspor barang dan jasa luar negeri berkontribusi 12,16 persen; dan komponen impor sebagai faktor pengurang dalam PDRB berkontribusi 0,55 persen). PMTB sebagai komponen pengungkit investasi memberikan andil yang juga cukup besar yaitu 21,95 persen. Komponen PKP hanya memberikan andil berkisar pada angka enam hingga delapan persen. Sementara komponen PKLNPRT memberikan andil kurang dari satu persen.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,14	-0,44	3,41	4,46	4,19
2. Konsumsi LNPRT	7,61	-0,75	1,94	6,05	10,31
3. Konsumsi Pemerintah	7,58	-5,24	0,05	1,51	1,97
4. PMTB	3,63	1,04	9,27	2,51	9,88
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	-0,03	-28,26	23,36	-6,41	-17,43
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	-5,00	-5,52	-54,13	19,77	72,33
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Total PDRB	4,35	-0,51	3,70	5,12	4,66

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 5,12 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-0,51 persen). Kontraksi yang terjadi pada perekonomian Provinsi Jambi tahun 2020 disebabkan banyak komponen penyusun PDRB pengeluaran yang terkena imbas pandemi Covid-19. Tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai dirasakan, hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,66 persen. Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2019–2023 mencapai 3,47 persen per tahun.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam menggenjot perekonomian setelah terpuruk oleh pandemi Covid-19. Perekonomian Provinsi Jambi terkontraksi hingga mencapai 0,51 persen pada tahun 2020 dan pada tahun 2022 perekonomian berhasil tumbuh impresif mencapai 5,12 persen. Kemudian, perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2023 kembali tumbuh akan tetapi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 4,66 persen.

Pada tahun 2023, pada umumnya seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali komponen ekspor barang dan jasa luar negeri. Komponen dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah komponen PKLNPRT yang tumbuh cukup signifikan sebesar 10,31 persen dan diikuti oleh komponen PMTB yang tumbuh sebesar 9,88 persen. Pertumbuhan kedua komponen tersebut adalah capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	147,59	148,71	153,05	162,94	169,32
2. Konsumsi LNPRT	150,37	151,97	155,55	164,36	169,99
3. Konsumsi Pemerintah	157,89	163,26	167,32	170,41	174,70
4. PMTB	143,77	143,84	146,41	154,32	162,51
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	103,73	94,57	111,79	138,67	131,95
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	151,16	142,40	145,60	172,84	178,21
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Total PDRB	145,48	138,24	150,99	171,10	173,53

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Pada tabel 3.5 disajikan indeks implisit komponen PDRB menurut pengeluaran. Indeks implisit PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Selama periode 2019–2023, indeks implisit tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 173,53. Pada tahun tersebut, indeks implisit tertinggi terjadi pada subkomponen impor barang dan jasa luar negeri yaitu sebesar 178,21 persen. Sedangkan komponen dengan indeks terendah adalah subkomponen ekspor barang dan jasa yaitu sebesar 131,95 persen.

https://jambi.bps.go.id

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Tabel 3.6 menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama pandemi Covid-19, masyarakat Provinsi Jambi cenderung untuk menahan konsumsinya. Setelah masa pemulihan tahun 2021–2022, kondisi perekonomian yang semakin membaik mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.

Tabel 3.6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi rumah tangga					
a. ADHB (milliar Rp)	96.343,53	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68
b. ADHK (milliar Rp)	65.279,81	64.991,05	67.206,01	70.205,87	73.149,41
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	44,41	47,13	44,28	41,34	42,17
Rata-rata konsumsi per rumah tangga/tahun (ribu Rp.)					
a. ADHB	108.567,59	109.735,45	103.940,11	114.109,92	121.966,37
b. ADHK 2010	73.562,51	73.789,40	67.912,78	70.031,91	72.034,74
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (ribu Rp.)					
a. ADHB	27.015,76	27.314,32	28.680,17	31.485,66	33.663,49
b. ADHK 2010	18.305,16	18.366,97	18.739,15	19.323,48	19.882,05
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi rumah tangga	4,14	-0,44	3,41	4,46	4,19
b. Per rumah tangga	4,28	0,31	-7,96	3,12	2,86
c. Per kapita	4,26	0,34	2,03	3,12	2,89
Jumlah penduduk (000 orang)	3.566,20	3.538,48	3.586,40	3.633,19	3.679,17

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Selama lima tahun terakhir, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan secara nominal (atas dasar harga berlaku). Sedangkan secara riil (atas dasar harga konstan) sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kemudian kembali meningkat di tahun 2021. PDRB atas dasar harga konstan terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 73,15 triliun rupiah. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga di Provinsi Jambi. Karena kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi PKRT terhadap PDRB pada periode 2019–2023 cukup berfluktuatif. Titik terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 41,34 persen dan titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 47,13 persen. Meningkatnya porsi konsumsi rumah tangga dalam PDRB disebabkan karena ada porsi komponen lain yang mengalami penurunan (Tabel 3.3). Pada tahun 2023, porsi PKRT sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun tersebut, komponen konsumsi pemerntah dan kinerja perdagangan Provinsi Jambi sedikit melemah yang didorong oleh penurunan proporsi ekspor barang dan jasa luar negeri.

Pada tahun 2019, secara umum setiap rumah tangga di Jambi menghabiskan dana sekitar 108,57 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan lain-lain). Pengeluaran ini berfluktuatif dengan masing-masing sebesar 109,74 juta rupiah (2020); 103,94 juta rupiah (2021); 114,11 juta rupiah (2022); dan 121,97 juta rupiah (2023).

Secara total, pertumbuhan komponen PKRT atas dasar harga konstan sebesar 4,14 persen pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun berikutnya terkontraksi sebesar 0,44 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar konstan mulai mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,41 persen dan bahkan pada tahun 2022 pertumbuhannya mencapai 4,46 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan komponen ini sedikit melambat dengan pertumbuhan 4,19 persen. Melemahnya harga batubara acuan (HBA) serta harga minyak bumi dan gas yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Jambi berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Provinsi jambi.

Berdasarkan harga konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh 0,52 persen selama 2019–2023 dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,28 persen. Pada tahun 2020 konsumsi per rumah tangga mengalami perlambatan hingga 0,31 persen dan semakin melemah hingga terkontraksi pada tahun 2021 sebesar 7,96 persen. Kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 3,12 persen. Pada tahun 2023 konsumsi per rumah tangga kembali mengalami perlambatan sebesar 2,86 persen.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	44,62	45,42	45,65	46,32	46,32
Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	3,27	3,16	3,01	2,98	2,87
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	15,81	15,83	15,46	15,22	14,99
Kesehatan dan Pendidikan	12,64	13,27	12,97	12,03	11,74
Transportasi dan Komunikasi	21,26	19,91	20,49	20,91	21,51
Hotel dan Restoran	0,84	0,83	0,83	0,87	0,88
Lainnya	1,56	1,58	1,58	1,68	1,70
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat, seiring dengan kenaikan harga subkelompok ini yang lebih tinggi. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,62 persen (2019); 45,42 persen (2020); 45,65 persen (2021); dan 46,32 persen (2022 dan 2023).

Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Pada tahun 2023, kelompok konsumsi non makanan yang memberikan andil terbesar pada pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah kelompok transportasi dan komunikasi yaitu sebesar 21,51 persen. Kemudian diikuti oleh kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga serta kelompok kesehatan dan pendidikan dengan masing-masing andil sebesar 14,99 persen dan 11,74 persen. Kelompok konsumsi yang memberikan andil terkecil adalah kelompok hotel dan restoran yaitu sebesar 0,88 persen.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,08	0,93	1,99	3,95	3,23
Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	2,05	-4,12	1,07	9,15	3,60
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4,51	1,16	2,81	4,94	4,33
Kesehatan dan Pendidikan	6,94	5,29	3,06	2,47	4,59
Transportasi dan Komunikasi	3,23	-6,30	7,24	5,14	5,47
Hotel dan Restoran	2,35	-6,00	5,20	10,20	7,77
Lainnya	-0,31	-1,96	2,10	8,11	5,86
Total Konsumsi	4,14	-0,44	3,41	4,46	4,19

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dilihat dari pertumbuhan riilnya, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga menunjukkan fluktuasi selama periode 2019–2023, dengan rincian masing-masing sebesar 4,14 persen (2019); minus 0,44 persen (2020); 3,41 persen (2021); 4,46 persen (2022); dan 4,19 persen (2023). Pertumbuhan "riil" menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Laju pertumbuhan riil tertinggi pada tahun 2023 terjadi pada kelompok konsumsi restoran dan hotel (7,77 persen). Kemudian disusul oleh kelompok konsumsi lainnya dengan laju 5,86 persen dan kelompok transportasi dan komunikasi (5,47 persen). Sejak tahun 2021, perekonomian Provinsi Jambi kembali menggeliat meskipun sedikit melambat pada tahun 2023. Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah yang berlaku mulai 30 Desember 2022 mendorong pertumbuhan yang cukup signifikan pada kelompok konsumsi yang menunjang mobilitas masyarakat.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.9 Pertumbuhan Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,63	1,18	4,86	8,57	4,87
Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	3,87	0,84	0,53	0,81	0,52
Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,48	-0,70	1,08	4,32	2,21
Kesehatan dan Pendidikan	4,96	0,04	0,93	0,61	1,05
Transportasi dan Komunikasi	2,10	0,27	2,16	7,94	5,60
Hotel dan Restoran	3,06	5,13	1,41	4,79	1,76
Lainnya	2,98	3,82	4,57	9,19	3,58

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 3.9, menunjukkan perubahan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan dan minuman, selain restoran sebesar 4,63 persen (2019); 1,18 persen (2020); 4,86 persen (2021); 8,57 persen (2022); dan 4,87 persen (2023).

Sementara itu, pertumbuhan implisit kelompok konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya sebesar 3,87 persen (2019). Pada tahun berikutnya implisit kelompok konsumsi ini melambat sebesar 0,84 persen (2020) dan 0,53 persen (2021). Pertumbuhan implisit kelompok konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya pada tahun 2022 sedikit meningkat sebesar 0,81 persen dan kembali melambat pada tahun 2023 sebesar 0,52 persen.

Pada tahun 2023, harga kelompok transportasi dan komunikasi mengalami inflasi hingga 5,60 persen. Sedangkan kelompok lainnya; kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kelompok hotel dan restoran; dan kelompok kesehatan dan pendidikan mengalami inflasi masing-masing sebesar 3,58 persen; 2,21 persen; 1,76 persen; dan 1,05 persen.

https://jambi.bps.go.id

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih relatif kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa peranan konsumsi akhir LNPRT terhadap PDRB masih relatif kecil.

Tabel 3.10 Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar Rp)	1.270,94	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	845,22	838,90	855,19	906,94	1.000,47
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,59	0,62	0,57	0,54	0,58

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, proporsi pengeluaran konsumsi lembaga non profit cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi pengeluaran konsumsi lembaga non profit pada masing-masing tahun sebesar 0,59 persen (2019); 0,62 persen (2020); 0,57 persen (2021); 0,54 persen (2022); dan 0,58 persen (2023).

Peningkatan proporsi konsumsi lembaga non profit pada tahun 2020 didorong oleh adanya pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2020 di Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, proporsi komponen LNPRT sedikit menurun dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 0,58 persen. Selain itu, aktivitas LNPRT juga mengalami peningkatan yang cukup tajam yang didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan pada periode 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024. Pemilu 2024 adalah pemilihan serentak presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Biaya rapat koordinasi dan kampanye (pemasangan spanduk, baliho, dan sosialisasi) mendorong pengeluaran lembaga non profit meningkat.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Total konsumsi akhir mencakup konsumsi akhir pemerintah, rumah tangga, dan LNPRT. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Provinsi Jambi serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi pemerintah					
a. ADHB (miliar Rp.)	18.246,78	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	11.556,81	10.950,82	10.956,42	11.121,82	11.341,35
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	8,41	8,72	7,89	6,85	6,75
Konsumsi pemerintah per kapita (ribu Rp.)					
a. ADHB	5.116,59	5.052,61	5.111,66	5.216,63	5.385,18
b. ADHK 2010	3.240,65	3.094,78	3.055,00	3.061,17	3.082,58
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	7,58	-5,24	0,05	1,51	1,97
b. Konsumsi per kapita	7,71	-4,50	-1,29	0,20	0,70
Jumlah penduduk (ribu orang)	3.566,20	3.538,48	3.586,40	3.633,19	3.679,17

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 18,25 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi komponen ini mengalami penurunan menjadi 17,88 triliun rupiah. Sejak tahun 2021, konsumsi akhir pemerintah kembali meningkat dan bahkan mencapai 19,81 triliun rupiah di tahun 2023.

Demikian halnya dengan pengeluaran pemerintah atas dasar harga konstan yang juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 terdapat belanja pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, tetapi proporsinya tidak terlalu signifikan mempengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah secara total. Pada tahun 2021, pengeluaran pemerintah sebesar 10,96 triliun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 11,12 triliun rupiah (2022) dan 11,34 triliun rupiah (2023).

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB berkisar pada angka 6,75 persen hingga 8,72 persen. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 5,12 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat Tabel 3.11).

Selama periode 2019-2023 konsumsi pemerintah per kapita ADHK berfluktuasi. Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHK selama lima tahun terakhir mencapai 3,11 juta rupiah. Indikasi perlambatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas mulai terlihat pada tahun 2020. Hal itu juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang terkontraksi hingga 4,50 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan konsumsi per kapita masih terkontraksi sebesar 1,29 persen dan kembali tumbuh positif di tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 0,20 persen dan 0,70 persen.

Selain laju pertumbuhan konsumsi per kapita, parameter laju total konsumsi pemerintah juga dapat digunakan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Secara struktur, pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan atas dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran pemerintah kolektif dan pengeluaran pemerintah individu.

https://jambi.bps.go.id

Sebagian besar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Lebih dari 55 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Pengeluaran konsumsi kolektif mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga tahun 2021, dan kembali meningkat di tahun 2022 dan 2023. Proporsi pengeluaran pemerintah kolektif pada tahun 2019 sebesar 60,74 persen dan sedikit menurun pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing menjadi 59,65 persen dan 55,85 persen. Pada tahun 2022, struktur konsumsi ini kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan proporsi sebesar 60,84 persen dan mencapai 61,92 persen di tahun 2023.

Tabel 3.12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah					
Konsumsi Kolektif	60,74	59,65	55,85	60,84	61,92
Konsumsi Individu	39,26	40,35	44,15	39,16	38,08
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK 2010)					
a. Konsumsi Kolektif	8,51	-5,86	-7,16	9,72	3,78
b. Konsumsi Individu	6,17	-4,28	11,10	-9,00	-0,82
Total Konsumsi	7,58	-5,24	0,05	1,51	1,97
Pertumbuhan indeks harga implisit					
a. Konsumsi Kolektif	-0,58	2,22	3,41	2,65	2,51
b. Konsumsi Individu	0,78	5,20	0,99	0,77	2,50
Total Konsumsi	-0,05	3,40	2,49	1,85	2,51

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Proporsi konsumsi individu pada tahun 2019 sebesar 39,26 persen dan mengalami peningkatan menjadi 40,35 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, proporsinya kembali meningkat mencapai 44,15 persen dan merupakan proporsi terbesar selama lima tahun terakhir. Proporsi konsumsi individu semakin menurun, hingga pada tahun 2023 proporsinya menjadi 38,08 persen. Kenaikan proporsi konsumsi individu pada tahun 2020-2021 terutama disebabkan pengeluaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain perubahan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan perubahan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.13 menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019–2023 berfluktuasi. Laju pertumbuhan PMTB tahun 2019 sebesar 3,63 persen, kemudian melambat sebesar 1,04 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan komponen ini mencapai 9,27 persen (satu-satunya komponen yang bisa tumbuh tinggi di tengah pandemi Covid-19). Pada tahun 2022 pertumbuhan komponen ini kembali melambat sebesar 2,51 persen. Komponen PMTB tumbuh sangat signifikan mencapai 9,88 persen pada tahun 2023 dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi bagi komponen PMTB selama lima tahun terakhir.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (miliar Rp)	45.855,12	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.463,11
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	31.894,30	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	21,14	22,60	22,20	20,13	21,95
Struktur PMTB (%)					
Bangunan	72,89	72,61	74,10	72,47	70,78
Non Bangunan	27,11	27,39	25,90	27,53	29,22
Total PMTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
Bangunan	3,70	0,70	9,47	-0,75	8,30
Non Bangunan	3,43	1,96	8,76	11,19	13,63
Total PMTB	3,63	1,04	9,27	2,51	9,88

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing subkomponen sangat bervariasi. Subkomponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dimana selama lima tahun terakhir subkomponen ini memberikan andil di atas 70 persen terhadap total PMTB. Jika dilihat dari pertumbuhannya, subkomponen bangunan sangat berfluktuatif sedangkan subkomponen nonbangunan cenderung meningkat.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2019–2022 (Tabel 3.13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing subkomponen PMTB. Pertumbuhan "riil" subkomponen bangunan pada tahun 2019 sebesar 3,70 persen akan tetapi pada tahun 2020 kembali melambat sebesar 0,70 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan subkomponen ini tumbuh signifikan dengan pertumbuhan sebesar 9,47 persen. Subkomponen ini mengalami kontraksi sebesar 0,75 persen pada tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, subkomponen ini kembali menguat dengan pertumbuhan sebesar 8,30 persen.

Pertumbuhan subkomponen non bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan komponen ini sebesar 3,43 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan komponen ini melambat sebesar 1,96 persen dan pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 8,76 persen. Berbeda dengan sub komponen bangunan, komponen non bangunan pada tahun 2022 justru mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 11,19 persen. Pada tahun 2023, subkomponen ini kembali menggeliat dengan pertumbuhan sebesar 13,63 persen dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir.

https://jambi.bps.go.id

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan posisi persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan posisi persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Hal ini mengindikasikan perekonomian pada tahun tersebut berjalan kurang bagus. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar Rp)	1.627,91	1.553,19	2.759,71	2.152,94	2.420,23
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	1.177,08	814,98	1.720,56	1.286,55	1.271,85
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,75	0,76	1,19	0,78	0,82

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji secara rinci. Komponen ini dalam PDRB nilainya berfluktuasi. Penambahan inventori terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,55 triliun rupiah dan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu 2,76 triliun rupiah.

Jika dilihat dari proporsinya, komponen inventori memberikan andil yang relatif kecil terhadap PDRB pengeluaran Provinsi Jambi. Selama periode 2019–2023, proporsi komponen ini masih di bawah dua persen. Pada tahun 2019, proporsinya sebesar 0,75 persen dan sedikit meningkat di tahun 2019 menjadi 0,76 persen. Pada tahun 2021, proporsi komponen ini kembali meningkat menjadi 1,19 persen dan proporsinya pada tahun 2023 hanya sebesar 0,82 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR LUAR NEGERI PROVINSI JAMBI

Perkembangan ekspor Provinsi Jambi berkaitan erat dengan kondisi pasar internasional, karena proses ekspor merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari perdagangan luar negeri. Provinsi Jambi berperan aktif di dalam penjualan komoditi andalan regional berupa hasil tambang dan perkebunan. Ekspor bukan hanya menciptakan nilai tambah bagi perekonomian, namun aktivitas perdagangan ini diharapkan juga memberikan rangsangan untuk menumbuhkan permintaan dalam negeri sehingga industri akan terus meningkatkan output.

Tabel 3.15 Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri					
a. ADHB (miliar p.)	40.730,57	26.637,81	38.844,96	45.098,99	35.432,95
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	39.266,74	28.168,66	34.748,49	32.522,37	26.853,10
c. Laju Pertumbuhan (persen)	-0,03	-28,26	23,36	-6,41	-17,43
d. Indeks Implisit Ekspor	103,73	94,57	111,79	138,67	131,95
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	18,78	12,99	16,72	16,30	12,06

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Komponen ekspor barang dan jasa luar negeri Provinsi Jambi selama periode 2019–2023 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2020 angka ekspor barang dan jasa luar negeri atas dasar harga berlaku menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 26,64 triliun rupiah dimana pada tahun sebelumnya nilai ekspor barang dan jasa luar negeri sebesar 40,73 triliun rupiah. Penurunan nilai komponen ini yang sangat signifikan disebabkan oleh penurunan permintaan komoditas ekspor selama pandemi Covid-19 terutama negara tujuan utama ekspor Provinsi Jambi (Cina, India, dan Singapura). Namun, secara perlahan-lahan nilai komponen ini kembali membaik. Pada tahun 2021, dari sisi atas dasar harga berlaku nilainya mencapai 38,84 triliun rupiah. Bahkan pada tahun 2022 nilainya mencapai 45,10 triliun rupiah yang merupakan nilai ekspor tertinggi selama lima tahun terakhir. Nilai ekspor barang dan jasa luar negeri kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 35,43 triliun rupiah.

Pertumbuhan riil ekspor ke luar negeri atas dasar harga konstan 2010 selama 2019–2023 pada umumnya mengalami kontraksi kecuali di tahun 2021. Pada tahun 2020, pertumbuhan minus terjadi sangat dalam (-28,26 persen) yang didorong oleh peraturan yang membatasi beberapa komoditas ekspor yang dilakukan oleh kementrian perdagangan demi mengurangi penyebaran Covid-19 dan penurunan permintaan luar negeri. Pada tahun 2021, ketika pemulihan ekonomi dilakukan maka kinerja ekspor juga semakin membaik dan kembali tumbuh positif bahkan pertumbuhannya mencapai 23,36 persen.

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa luar negeri Provinsi Jambi selama 2022–2023 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Pada tahun 2022, ekpor luar negeri Provinsi Jambi terkontraksi sebesar 6,41 persen. Meskipun nilai komponen ini atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, akan tetapi atas dasar harga konstan 2010 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasi bahwa terjadi kenaikan harga pada komoditas ekspor luar negeri, akan tetapi secara volume terjadi penurunan. Pada tahun 2023, kinerja ekspor Provinsi Jambi kembali menurun dengan pertumbuhan terkontraksi sebesar 17,43 persen. Menurunnya kinerja ekspor di tahun 2023 dikarenakan menurunnya ekspor CPO yang merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Jambi.

Jika dilihat perkembangan dari indeks implisit, maka indeks implisit ekspor terendah pada tahun 2020 mencapai 94,57 dan tertinggi tahun 2022 mencapai hingga 138,67. Indeks implisit tahun 2019, 2021 dan 2023 masing-masing sebesar 103,73; 111,79; dan 131,95.

https://jambi.bps.go.id

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR LUAR NEGERI PROVINSI JAMBI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun investasi (PMTB dan perubahan inventori) dan ekspor, di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Jambi. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB menurut pengeluaran dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen.

Tabel 3.16 menunjukkan bahwa pola perkembangan impor barang dan jasa luar negeri Provinsi Jambi pada periode tahun 2019–2021 cenderung menurun (atas dasar harga berlaku), kemudian pada tahun 2022 kembali meningkat. Pada tahun 2019 nilai impor barang dan jasa luar negeri mencapai 1,54 triliun rupiah dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,37 triliun rupiah. Pada tahun 2021 impor turun cukup signifikan menjadi 0,64 triliun rupiah. Pada tahun 2022 impor kembali meningkat menjadi 0,91 triliun rupiah dan mencapai 1,62 triliun rupiah pada tahun 2023.

Tabel 3.16 Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Impor Barang dan Jasa Luar Negeri					
a. ADHB (miliar Rp.)	1.535,19	1.366,32	640,87	911,17	1.618,96
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	1.015,61	959,51	440,15	527,17	908,44
c. Laju Pertumbuhan (persen)	-5,00	-5,52	-54,13	19,77	72,33
d. Indeks Implisit Impor	151,16	142,40	145,60	172,84	178,21
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,71	0,67	0,28	0,33	0,55

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Nilai impor barang dan jasa luar negeri menurut dasar harga konstan sejalan dengan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku. Nilai impor luar negeri mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, nilai impor luar negeri Provinsi Jambi sebesar 0,44 triliun rupiah atau terkontraksi sebesar 54,13 persen dibandingkan dengan nilai impor luar negeri pada tahun 2020 yang sebesar 0,96 triliun rupiah. Pada tahun 2022, impor kembali menggeliat dengan pertumbuhan sebesar 19,77 persen. Kemudian pada tahun 2023, impor kembali tumbuh signifikan menjadi 0,91 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 72,33 persen.

Menurut perkembangan indeks implisitnya, harga komoditas impor luar negeri cenderung naik kecuali di tahun 2020. Pada tahun 2019, nilai indeks implisit impor sebesar 151,16 kemudian turun hingga mencapai 142,40 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, indeks implisit menguat dengan nilai indeks sebesar 145,60. Posisi nilai impor luar negeri atas dasar harga berlaku sedikit menguat dibandingkan nilai impor atas dasar harga konstannya. Indeks implisit kembali meningkat menjadi sebesar 172,84 pada tahun 2022 dan 178,21 pada tahun 2023, yang merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTARDAERAH PROVINSI JAMBI

Perdagangan ekspor impor tidak hanya yang dilakukan dari dan ke luar negeri saja, tetapi juga yang dilakukan dari dan ke luar provinsi, serta yang dilakukan oleh nonresiden yang berasal dari provinsi lain. Indikator yang digunakan adalah ekspor impor antardaerah. Sama halnya dengan yang dilakukan dengan komponen impor luar negeri, maka impor yang dilakukan dari provinsi lain juga diperlakukan sebagai faktor koreksi (pengurang).

Penguatan kinerja perdagangan Provinsi Jambi salah satunya dapat dilihat dari kegiatan ekspor impor barang dan jasa antardaerah (net ekspor barang dan jasa antardaerah). Selama lima tahun terakhir, komponen ini cenderung naik dan selalu bernilai positif yang berarti bahwa nilai ekspor selalu lebih tinggi dari nilai impor. Ekspor barang dan jasa antardaerah atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 14,39 triliun rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 47,66 triliun rupiah pada tahun 2023. Sama halnya dengan ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 0,11 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 16,89 triliun rupiah pada tahun 2023.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 3.17 Perkembangan Impor Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah					
a. ADHB (miliar Rp.)	14.388,04	16.098,10	17.249,38	39.830,65	47.664,59
b. ADHK 2010 (miliar Rp.)	106,74	11.322,37	3.588,59	10.113,59	16.893,66
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	6,63	7,85	7,43	14,39	16,23

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Ekspor impor barang dan jasa antardaerah Provinsi Jambi setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kontribusi net ekspor barang dan jasa antardaerah selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2019, komponen ini berkontribusi sebesar 6,63 persen terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Kemudian terus meningkat sebesar 14,39 persen pada tahun 2022 dan mencapai 16,23 persen pada tahun 2023.

BAB 4
PERKEMBANGAN PDRB

INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR berfluktuasi dengan rentang -42,58 sampai dengan 6,41. Tahun 2019 angka ICOR pada posisi 5,14 menjadi 5,26 pada 2023.

Rasio Ekspor terhadap Impor

Rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2019-2023. Pada 2019 besar rasio ini 1,51, sedangkan pada 2023 sebesar 1,76

Total Konsumsi Akhir dan PDRB

Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB terkadang mengalami penurunan. Pada tahun 2023 proporsi antar keduanya sebesar 49,49

https://ljambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

BAB 4 PERKEMBANGAN PDRB

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana didalamnya masih terkandung nilai penyusutan. Nilai PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB					
a. ADHB (miliar Rp)	216.927,71	205.081,99	232.294,15	276.719,44	293.729,31
b. ADHK 2010 (miliar Rp)	149.111,09	148.354,25	153.850,63	161.730,02	169.268,77
PDRB Perkapita					
a. ADHB (ribu Rp)	60.828,86	57.957,73	64.770,93	76.164,32	79.835,78
b. ADHK 2010 (ribu Rp)	41.812,35	41.926,04	42.898,41	44.514,61	46.007,34
Pertumbuhan (%)					
PDRB Perkapita ADHK 2010	4,46	0,27	2,32	3,77	3,35
Jumlah Penduduk (ribu orang)	3.566,20	3.538,48	3.586,40	3.633,19	3.679,17

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dari *series* data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Selama periode 2019-2023 PDRB per kapita Provinsi Jambi cenderung meningkat (Tabel 4.1), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Provinsi Jambi rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Meskipun pada tahun 2020 PDRB per kapita sempat terpuruk, tetapi semakin membaik seiring dengan pemulihan pasca Covid-19.

Pertumbuhan perkapita secara riil pada tahun 2019 tumbuh 4,46 persen, kemudian melambat pada tahun 2020. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan membaik mencapai 3,77 persen meskipun agak melambat di tahun 2023 sebesar 3,35 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,35 persen juga diikuti pula oleh peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,27 persen.

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Tabel 4.2 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) (miliar Rp)	96.343,53	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68
Total Ekspor (ADHB) (miliar Rp)	158.700,84	135.816,76	154.158,13	188.120,45	188.311,79
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor	0,61	0,71	0,67	0,61	0,66

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik terhadap ekspor dengan produk yang diekspor, baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Jambi (*share* tahun 2023 sebesar 42,17 persen), yang artinya bahwa seluruh nilai tambah yang dihasilkan di wilayah Jambi sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

https://jambi.bps.go.id

Peningkatan dan penurunan ekspor disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Sedangkan peningkatan dan penurunan konsumsi rumah tangga disebabkan harga (inflasi) dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Sekilas tampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Jambi digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(miliar Rp)	96.343,53	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68
Total PMTB (ADHB) (miliar Rp)	45.855,12	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.463,11
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	2,10	2,09	1,99	2,05	1,92

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Seperti halnya dengan perbandingan terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB relatif stabil. Pada periode 2019–2023, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun. Pada tahun 2019, rasio konsumsi rumah tangga sebesar 2,10 persen dan semakin menurun di tahun 2021 sebesar 1,99 persen. Pada tahun 2022 rasio tersebut sedikit meningkat sebesar 2,05 persen dan kembali melambat sebesar 1,92 persen pada tahun 2023.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB terkadang mengalami penurunan. Dalam hal ini, komponen yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif besar.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 4.4 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	96.343,53	96.651,04	102.858,40	114.393,37	123.853,68
b. LNPRT	1.270,94	1.274,91	1.330,25	1.490,60	1.700,72
c. Pemerintah	18.246,78	17.878,52	18.332,42	18.953,03	19.812,99
Jumlah	115.861,25	115.804,47	122.521,07	134.837,00	145.367,39
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	216.927,71	205.081,99	232.294,15	276.719,44	293.729,31
Proporsi	53,41	56,47	52,74	48,73	49,49

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Pada tahun 2019-2023 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (Tabel 4.5). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) diperlukan sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 cenderung naik. Sedangkan pada tahun 2023, rasio tersebut kembali mengalami penurunan. Penurunan rasio tersebut diantaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan PMTB.

Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar Rp)	158.700,84	135.816,76	154.158,13	188.120,45	188.311,79
Total PMTB (ADHB) (miliar Rp)	45.855,12	46.354,76	51.559,91	55.711,02	64.463,11
Rasio Ekspor terhadap PMTB	3,46	2,93	2,99	3,38	2,92

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Rasio ekspor terhadap PMTB mencapai titik tertinggi sebesar 3,46 yang terjadi pada tahun 2019 sedangkan terendah pada tahun 2023 sebesar 2,92. Rasio ekpor terhadap PMTB perlahan merangkak naik menjadi 2,99 pada tahun 2021 dan 3,38 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio ekspor terhadap PMTB kembali turun yang menunjukkan bahwa peningkatan ekspor relatif lebih kecil daripada peningkatan PMTB.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 4.6 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	216.927,71	205.081,99	232.294,15	276.719,44	293.729,31
Total Impor (ADHB) (miliar Rp)	105.117,41	94.447,18	98.704,67	104.101,98	106.833,21
Rasio PDRB terhadap Impor	2,06	2,17	2,35	2,66	2,75

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Rasio PDRB terhadap impor menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2019–2023. Pada tahun 2019 rasio PDRB terhadap impor sebesar dari 2,06 dan meningkat menjadi 2,17 pada tahun 2020. Pada tahun tahun 2021, rasio tersebut kembali meningkat menjadi 2,35 dan mencapai angka tertinggi di tahun 2023 sebesar 2,75. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor. Meningkatnya rasio pada tahun 2023 disebabkan penurunan impor lebih besar dibandingkan penurunan PDRB.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

https://jambi.bps.go.id

Tabel 4.7 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (miliar Rp)	216.927,71	205.081,99	232.294,15	276.719,44	293.729,31
Persentase (%)	67,36	68,47	70,18	72,66	73,33
Total Nilai Impor ADHB (miliar Rp)	105.117,41	94.447,18	98.704,67	104.101,98	106.833,21
Persentase (%)	32,64	31,53	29,82	27,34	26,67
Total Permintaan Akhir (miliar Rp)	322.045,12	299.529,17	330.998,82	380.821,42	400.562,52
Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar Provinsi Jambi, dengan rentang nilai 26,67-32,64 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 67-73 persen dari produksi domestik. Tendensi permintaan (akhir) masyarakat pada tahun 2020 cenderung menurun dari 322,05 triliun rupiah (2019) menjadi sebesar 299,53 triliun rupiah (2019). Pada tahun 2021 kecenderungan permintaan akhir meningkat dan mencapai angka tertinggi sebesar 400,56 triliun rupiah di tahun 2023.

Di sisi lain penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 216,93 triliun rupiah (2019); 205,08 triliun rupiah (2020); 232,29 triliun rupiah (2021); 276,72 triliun rupiah (2022); dan 293,73 triliun rupiah (2023). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 105,12 triliun rupiah (2019); 94,45 triliun rupiah (2020); 98,70 triliun rupiah (2021); 104,10 triliun rupiah (2022); dan 106,83 triliun rupiah (2023).

https://jambi.bps.go.id

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi ekspor dan impor yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar (*non residen*) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "Ekspor Neto". Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

https://jambi.bps.go.id

Tabel 4.8 Neraca Perdagangan Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (miliar Rp)	158.700,84	135.816,76	154.158,13	188.120,45	188.311,79
Nilai Impor (ADHB) (miliar Rp)	105.117,41	94.447,18	98.704,67	104.101,98	106.833,21
Net Ekspor (X-M) (miliar Rp)	53.583,43	41.369,58	55.453,46	84.018,47	81.478,58
Rasio Ekspor terhadap Impor	1,51	1,44	1,56	1,81	1,76

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Selama periode 2019–2023, perdagangan Provinsi Jambi dengan wilayah luar negeri maupun antar provinsi menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan Provinsi Jambi berada dalam posisi surplus.

Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran uang masuk. Surplus perdagangan Provinsi Jambi yang terjadi kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan 2023 tercatat masing-masing sebesar 53,58 triliun rupiah (2019); 41,37 triliun rupiah (2020); 55,45 triliun rupiah (2021); 84,02 triliun rupiah (2022); dan 81,48 triliun rupiah (2023).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2019–2023. Pada tahun 2019, rasionya sebesar 1,51 turun menjadi sekitar 1,44 pada tahun 2020. Pada Tahun 2021, rasio ekspor terhadap impor meningkat menjadi 1,56 dan kembali menguat menjadi 1,81 pada tahun 2022 yang merupakan level tertinggi selama lima tahun terakhir. Ketika memasuki tahun 2023, rasio ekspor terhadap impor kembali melemah menjadi 1,76.

4.9 *INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO* (ICOR)

Indikator ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

https://jambi.bps.go.id

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus-menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”nilai tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula perhitungan ICOR adalah sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

I_t = PMTB tahun ke-t
Y_t = Output tahun ke-t
Y_{t-1} = Output tahun ke-t-1

Tabel 4.9 *Incremental Capital Output Ratio* Provinsi Jambi, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp)	149.111,09	148.354,25	153.850,63	161.730,02	169.268,77
Perubahan PDRB ADHK (milliar Rp)	6.209,09	-756,83	5.496,37	7.879,40	7.538,75
PMTB (ADHK 2010) (milliar Rp)	31.894,30	32.226,99	35.215,52	36.100,05	39.667,37
ICOR	5,14	-42,58	6,41	4,58	5,26

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

Tabel 4.9 menunjukkan besaran ICOR berfluktuasi dengan rentang minus 42,58 sampai dengan 6,41. Pada periode 2019 (periode sebelum Covid-19), investasi dalam kondisi yang kondusif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai ICOR 2019 sebesar 5,14. Sedangkan ketika pandemi Covid-19 melanda, angka ICOR mencapai minus 42,58 (tahun 2020). Artinya investasi yang telah dilakukan ketika pandemi Covid-19 melanda belum bisa menghasilkan output secara optimal. Namun, pemulihan ekonomi pada tahun 2021 membawa titik terang terhadap perubahan kegiatan investasi. Hal tersebut dapat diamati dari nilai ICOR tahun 2021 yang pelan-pelan membaik (6,41). Pada tahun 2022, nilai ICOR mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 akan tetapi masih bertanda positif dengan nilai 4,57. Pada tahun 2023, nilai ICOR kembali meningkat menjadi 5,26.

https://jambi.bps.go.id

KESIMPULAN

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

BAB 5 KESIMPULAN

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan kegiatan ekspor impor. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran antara lain distribusi, laju pertumbuhan dan indeks implisit.
3. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2019 mencapai 4,35 persen. Namun, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mempengaruhi PDRB Provinsi Jambi sehingga laju pertumbuhan PDRB terkontraksi hingga 0,51 persen. Pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan pada tahun 2021, membawa sedikit perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 3,70 persen. Pada tahun 2022, perekonomian Provinsi Jambi berhasil tumbuh impresif sebesar 5,12 persen namun sedikit melambat di tahun 2023 sebesar 4,66 persen.
4. Pada tahun 2023, komponen PKRT mendominasi distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran sebesar 42,17 persen.
5. Komponen PKLNPRT pada tahun 2023 mencapai pertumbuhan tertinggi dengan laju sebesar 10,31 persen. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik pada masa kampanye Pemilu 2024 (pemilihan serentak presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif) yang dilaksanakan pada periode 28 November 2023-10 Februari 2024. Biaya kampanye meliputi pemasangan spanduk, baliho, dan sosialisasi mendorong pengeluaran lembaga non profit meningkat.

https://jambi.bps.go.id

6. Selama periode 2019–2023, net ekspor Provinsi Jambi (luar negeri dan antar provinsi) bernilai positif yang menunjukkan neraca perdagangan Provinsi Jambi selalu berada dalam posisi surplus.

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

https://jambi.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakara: Badan Pusat Statistik: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran*. Jakara: Badan Pusat Statistik: Badan Pusat Statistik.

_____. (2023). *Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. (2023). *Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2017-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. (2023). *Pendapatan Nasional Indonesia 2018-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. (2024). *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

European Communities, International Monetary Fund, Organization for Econmic Cooperation and Development, United Nations, and World Bank. (2009). *System of National Accounts 2008*, New York. (2023).

Frenken Jim. (1992). *How to Measure Tangible Capital Stocks*. Netherlands.

United Nations. (1986). *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods*. Series F No.39. New York.

_____. (1988). *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods*. Series F No.50. New York.

_____. (1973). *Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods.* Series F No.14 Rev. New York.

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (juta rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**96.343.529,88**	**96.651.035,77**	**102.858.403,04**	**114.393.369,89**	**123.853.680,49**
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	42.989.742,32	43.901.664,74	46.950.016,14	52.986.603,91	57.365.107,65
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannnya	3.154.148,88	3.049.389,52	3.098.614,44	3.409.293,26	3.550.328,12
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	15.230.969,28	15.300.975,68	15.901.228,71	17.406.160,81	18.561.110,37
d) Kesehatan dan Pendidikan	12.178.570,25	12.828.943,23	13.344.116,48	13.756.223,14	14.539.704,64
e) Transportasi dan Komunikasi	20.477.884,61	19.240.688,32	21.078.140,77	23.922.273,51	26.643.379,22
f) Restoran dan Hotel	813.972,81	804.415,02	858.119,67	990.929,01	1.086.719,29
g) Lainnya	1.498.241,74	1.524.959,24	1.628.166,81	1.921.886,25	2.107.331,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**1.270.940,47**	**1.274.912,26**	**1.330.253,17**	**1.490.604,80**	**1.700.720,96**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**18.246.783,75**	**17.878.520,93**	**18.332.423,33**	**18.953.025,13**	**19.812.986,34**
a) Konsumsi Kolektif	11.082.990,36	10.665.295,99	10.239.292,70	11.531.772,51	12.268.495,75
b) Konsumsi Individu	7.163.793,40	7.213.224,94	8.093.130,63	7.421.252,63	7.544.490,59
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**45.855.119,48**	**46.354.758,82**	**51.559.906,12**	**55.711.024,69**	**64.463.111,81**
a) Bangunan	33.421.749,70	33.658.193,86	38.203.759,48	40.371.179,23	45.628.080,18
b) Non-Bangunan	12.433.369,78	12.696.564,95	13.356.146,63	15.339.845,46	18.835.031,63
5. Perubahan Inventori	**1.627.910,46**	**1.553.185,81**	**2.759.707,67**	**2.152.944,57**	**2.420.229,97**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**53.583.424,19**	**41.369.578,84**	**55.453.461,58**	**84.018.468,68**	**81.478.581,80**
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	40.730.572,08	26.637.805,94	38.844.955,46	45.098.988,35	35.432.952,41
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1.535.187,50	1.366.322,76	640.874,55	911.165,51	1.618.961,33
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	14.388.039,61	16.098.095,67	17.249.380,67	39.830.645,84	47.664.590,72
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**216.927.708,24**	**205.081.992,42**	**232.294.154,91**	**276.719.437,76**	**293.729.311,38**

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100)

Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (juta rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**65.279.813,80**	**64.991.049,83**	**67.206.008,33**	**70.205.869,03**	**73.149.408,70**
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	27.666.624,82	27.923.200,61	28.478.061,66	29.602.473,74	30.559.479,82
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannnya	2.420.902,37	2.321.055,50	2.345.991,94	2.560.587,44	2.652.672,42
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	9.816.790,86	9.930.971,54	10.210.442,76	10.714.428,16	11.178.788,58
d) Kesehatan dan Pendidikan	8.541.256,71	8.993.402,12	9.268.587,96	9.497.288,93	9.933.667,39
e) Transportasi dan Komunikasi	15.218.901,68	14.260.416,63	15.292.479,66	16.079.020,11	16.958.891,23
f) Restoran dan Hotel	536.101,10	503.942,28	530.129,80	584.186,45	629.556,55
g) Lainnya	1.079.236,26	1.058.061,16	1.080.314,54	1.167.884,20	1.236.352,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**845.220,60**	**838.902,20**	**855.185,45**	**906.936,26**	**1.000.473,06**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**11.556.813,61**	**10.950.816,01**	**10.956.424,66**	**11.121.821,98**	**11.341.346,93**
a) Konsumsi Kolektif	7.037.519,35	6.625.127,65	6.150.797,34	6.748.675,39	7.004.088,48
b) Konsumsi Individu	4.519.294,25	4.325.688,36	4.805.627,33	4.373.146,60	4.337.258,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**31.894.295,76**	**32.226.990,00**	**35.215.517,75**	**36.100.051,29**	**39.667.373,94**
a) Bangunan	23.217.345,30	23.379.782,14	25.593.265,87	25.401.063,57	27.510.266,60
b) Non-Bangunan	8.676.950,47	8.847.207,85	9.622.251,88	10.698.987,72	12.157.107,34
5. Perubahan Inventori	**1.177.075,46**	**814.980,76**	**1.720.559,49**	**1.286.551,22**	**1.271.853,56**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**38.357.869,12**	**38.531.516,09**	**37.896.932,86**	**42.108.793,86**	**42.838.318,12**
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	39.266.737,13	28.168.655,46	34.748.487,48	32.522.368,77	26.853.103,37
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1.015.606,12	959.510,02	440.147,52	527.166,80	908.444,22
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	106.738,11	11.322.370,66	3.588.592,90	10.113.591,89	16.893.658,97
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**149.111.088,36**	**148.354.254,90**	**153.850.628,54**	**161.730.023,64**	**169.268.774,31**

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**44,41**	**47,13**	**44,28**	**41,34**	**42,17**
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	19,82	21,41	20,21	19,15	19,53
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannnya	1,45	1,49	1,33	1,23	1,21
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	7,02	7,46	6,85	6,29	6,32
d) Kesehatan dan Pendidikan	5,61	6,26	5,74	4,97	4,95
e) Transportasi dan Komunikasi	9,44	9,38	9,07	8,64	9,07
f) Restoran dan Hotel	0,38	0,39	0,37	0,36	0,37
g) Lainnya	0,69	0,74	0,70	0,69	0,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**0,59**	**0,62**	**0,57**	**0,54**	**0,58**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**8,41**	**8,72**	**7,89**	**6,85**	**6,75**
a) Konsumsi Kolektif	5,11	5,20	4,41	4,17	4,18
b) Konsumsi Individu	3,30	3,52	3,48	2,68	2,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**21,14**	**22,60**	**22,20**	**20,13**	**21,95**
a) Bangunan	**15,41**	**16,41**	**16,45**	**14,59**	**15,53**
b) Non-Bangunan	**5,73**	**6,19**	**5,75**	**5,54**	**6,41**
5. Perubahan Inventori	**0,75**	**0,76**	**1,19**	**0,78**	**0,82**
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	**24,70**	**20,17**	**23,87**	**30,36**	**27,74**
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	18,78	12,99	16,72	16,30	12,06
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	0,71	0,67	0,28	0,33	0,55
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	6,63	7,85	7,43	14,39	16,23
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Lampiran 4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**4,14**	**-0,44**	**3,41**	**4,46**	**4,19**
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	4,08	0,93	1,99	3,95	3,23
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannnya	2,05	-4,12	1,07	9,15	3,60
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	4,51	1,16	2,81	4,94	4,33
d) Kesehatan dan Pendidikan	6,94	5,29	3,06	2,47	4,59
e) Transportasi dan Komunikasi	3,23	-6,30	7,24	5,14	5,47
f) Restoran dan Hotel	2,35	-6,00	5,20	10,20	7,77
g) Lainnya	-0,31	-1,96	2,10	8,11	5,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**7,61**	**-0,75**	**1,94**	**6,05**	**10,31**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**7,58**	**-5,24**	**0,05**	**1,51**	**1,97**
a) Konsumsi Kolektif	8,51	-5,86	-7,16	9,72	3,78
b) Konsumsi Individu	6,17	-4,28	11,10	-9,00	-0,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**3,63**	**1,04**	**9,27**	**2,51**	**9,88**
a) Bangunan	3,70	0,70	9,47	-0,75	8,30
b) Non-Bangunan	3,43	1,96	8,76	11,19	13,63
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	-0,03	-28,26	23,36	-6,41	-17,43
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	-5,00	-5,52	-54,13	19,77	72,33
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**4,35**	**-0,51**	**3,70**	**5,12**	**4,66**

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Lampiran 5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)

Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**147,59**	**148,71**	**153,05**	**162,94**	**169,32**
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	155,38	157,22	164,86	178,99	187,72
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannnya	130,29	131,38	132,08	133,14	133,84
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	155,15	154,07	155,73	162,46	166,04
d) Kesehatan dan Pendidikan	142,59	142,65	143,97	144,84	146,37
e) Transportasi dan Komunikasi	134,56	134,92	137,83	148,78	157,11
f) Restoran dan Hotel	151,83	159,62	161,87	169,63	172,62
g) Lainnya	138,82	144,13	150,71	164,56	170,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**150,37**	**151,97**	**155,55**	**164,36**	**169,99**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**157,89**	**163,26**	**167,32**	**170,41**	**174,70**
a) Konsumsi Kolektif	157,48	160,98	166,47	170,87	175,16
b) Konsumsi Individu	158,52	166,75	168,41	169,70	173,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**143,77**	**143,84**	**146,41**	**154,32**	**162,51**
a) Bangunan	143,95	143,96	149,27	158,93	165,86
b) Non-Bangunan	143,29	143,51	138,80	143,38	154,93
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	103,73	94,57	111,79	138,67	131,95
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	151,16	142,40	145,60	172,84	178,21
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**145,48**	**138,24**	**150,99**	**171,10**	**173,53**

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

Lampiran 6 Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jambi (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	**3,57**	**0,76**	**2,92**	**6,46**	**3,91**
a) Makanan, Minuman, Selain Restoran	4,63	1,18	4,86	8,57	4,87
b) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannnya	3,87	0,84	0,53	0,81	0,52
c) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1,48	-0,70	1,08	4,32	2,21
d) Kesehatan dan Pendidikan	4,96	0,04	0,93	0,61	1,05
e) Transportasi dan Komunikasi	2,10	0,27	2,16	7,94	5,60
f) Restoran dan Hotel	3,06	5,13	1,41	4,79	1,76
g) Lainnya	2,98	3,82	4,57	9,19	3,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	**5,01**	**1,07**	**2,35**	**5,66**	**3,43**
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	**-0,05**	**3,40**	**2,49**	**1,85**	**2,51**
a) Konsumsi Kolektif	-0,58	2,22	3,41	2,65	2,51
b) Konsumsi Individu	0,78	5,20	0,99	0,77	2,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	**2,42**	**0,05**	**1,79**	**5,40**	**5,30**
a) Bangunan	3,25	0,01	3,69	6,47	4,36
b) Non-Bangunan	0,25	0,15	-3,28	3,29	8,06
5. Perubahan Inventori	–	–	–	–	–
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	–	–	–	–	–
a) Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	-8,08	-8,83	18,21	24,05	-4,85
b) Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	-0,93	-5,80	2,25	18,71	3,11
c) Net Ekspor Barang dan Jasa Antardaerah	–	–	–	–	–
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**0,01**	**-4,98**	**9,22**	**13,32**	**1,42**

Catatan : * Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Provinsi Jambi

https://jambi.bps.go.id

https://jambi.bps.go.id

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

https://jambi.bps.go.id

ISSN 2301-4466

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI
Jl. A. Yani No. 4, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. (0741) 60497 Fax. (0741) 60802
Homepage: http://jambi.bps.go.id/Email:bps15000@bps.go.id